

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI DI TIMUR TENGAH

Di era AKP, Turki telah berusaha untuk mengejar kebijakan luar negeri pro-aktif dan multidimensi. Dengan demikian, secara implisit kebijakan luar negeri sebelumnya dianggap stagnan, reaktif terhadap perkembangan dan aktor asing serta mono-dimensi (berorientasi ke arah Barat). Kiblat politik luar negeri Turki yang sebelumnya mengarah ke Eropa dan Barat kini kian berbelok arah. Kebijakan luar negeri Turki di dunia Islam khususnya Timur Tengah mengalami peningkatan dibandingkan dengan 100 tahun ke belakang. Reaksi ini terkait dengan urgensi Turki untuk mengejar ketinggalan dengan masyarakat yang lebih maju dan merasa bosan menjadi *underdog* dalam sistem internasional. Turki merasa dapat menjadi salah satu pemain besar di kawasan bahkan dunia. Oleh karena itu, Republik Turki bertujuan untuk menjadi salah satu dari 10 negara teratas di dunia pada tahun 2023.¹

A. Kebijakan Keamanan Turki

Timur Tengah menampung 40,5 persen cadangan gas alam dan 54,4 persen cadangan minyak yang dimiliki dunia. Biaya produksi di Timur Tengah secara signifikan lebih rendah daripada kawasan lain dengan Irak dan Arab Saudi yang mengendalikan zona produksi termurah di seluruh dunia. Hal tersebut secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa Timur Tengah memiliki

¹ Cengiz Dinc dan Mustafa Yetim, *Transformation of Turkish Foreign Policy Toward the Middle East: From Non-Involvement to a Leading Role*, *Alternatives Turkish Journal Of International Relations*, Vol. 11, No. 1, Musim Semi 2012, hlm. 76

penyangga strategis untuk membentuk, mendominasi dan mengubah keseimbangan di pasar energi global.²

Kebijakan strategis pertahanan digunakan untuk menghadapi gangguan atau ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam bentuk dan jenis apapun, kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk ancaman. Upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional pemerintah juga dapat terbantu oleh kekuatan pertahanan. Berdasarkan hasil perkiraan ancaman, Turki memiliki kepentingan strategis dengan menyatakan memiliki dan menghadapi “musuh yang sama” dengan salah satu negara sahabatnya di Timur Tengah, Qatar.³

1. Politik Turki

Setelah tahun 2007, keterkaitan antara kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri Turki terlihat semakin mencolok. Pemerintah lebih tertarik untuk menggunakan inisiatif kebijakan luar negeri sebagai alat strategis untuk mengkonsolidasikan dan memperluas basis koalisi domestiknya.⁴ Kebijakan luar negeri menjadi isu yang sangat diperebutkan dalam politik domestik dan dapat menjadi alat penting bagi sebuah partai politik untuk mendapatkan keunggulan dibandingkan pesaingnya. Konflik identitas dalam politik dalam negeri ini dapat berimplikasi luas pada perilaku dan orientasi kebijakan luar negeri Turki. AKP telah memanfaatkan

² Ahmet K. Han, *Turkey's Energy Strategy and the Middle East: Between a Rock and a Hard Place*, Turkish Studies, Vol. 12, No. 4, Desember 2011, hlm 603 – 604.

³ Tom Finn, *Turkey to set up Qatar military base to face 'common enemies'*, Reuters, 16 Desember 2015, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-qatar-turkey-military/turkey-to-set-up-qatar-military-base-to-face-common-enemies-idUSKBN0TZ17V20151216> pada 4 Desember 2017

⁴ Ziya Öniş, *Multiple Faces of the “New” Turkish Foreign Policy: Underlying Dynamics and a Critique*, Insight Turkey, Vol. 13, No. 1, 2011, hlm. 51

kebijakan luar negeri proaktif untuk mempertahankan dan mengkonsolidasikan keberhasilan pemilihannya dalam politik domestik. Identitas konservatif-religius AKP juga tercermin dalam semangat kebijakan luar negeri Turki yang baru. Dalam pengaruh AKP, Turki memperdalam hubungan dengan Timur Tengah serta memberi dukungan aktif untuk Palestina dan Iran dalam konflik kawasan dan internasional yang besar.⁵

Turki meningkatkan hubungan kemitraan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Turki terus memperkuat kebijakan politiknya di kawasan tersebut, kini dengan membonceng Qatar. Komitmen Turki khususnya kepada negara-negara dengan pemimpin yang berorientasi Muslim semakin meningkat. Tur perdana menteri Recip Tayyip Erdogan ke Mesir, Libya, dan Tunisia pada bulan September 2011 memperjelas bangkitnya keterlibatan Turki di kawasan tersebut, juga potensi Ankara untuk menjadi pengaruh yang kuat di kawasan.⁶

Kebijakan "*Zero Problems with Neighbors*" pemerintah Turki yang dirumuskan oleh menteri luar negeri Ahmet Davutoglu, membangun kembali hubungan Turki dengan hampir semua negara di Timur Tengah. Turki kemudian menjalin hubungan baik dengan Suriah dan Iran. Turki juga memperbaiki hubungan dengan Yunani dan Armenia serta menjadi mediator antara beberapa negara yang bersengketa.⁷

⁵ *Ibid.* hlm. 62

⁶ Kadir Ustun dan Nuh Yilmaz, *The Erdoğan Effect: Turkey, Egypt and the Future of the Middle East*, The Cairo Review of Global Affairs, Musim Gugur 2011, diakses dari <https://www.thecaireview.com/essays/the-erdogan-effect-turkey-egypt-and-the-future-of-the-middle-east/> pada 4 Desember 2017.

⁷ World Policy Institute, *A New Turkish Foreign Policy?*, 27 Agustus 2014, diakses dari <http://www.worldpolicy.org/blog/2014/08/27/new-turkish-foreign-policy> pada 4 Desember 2017

2. Keamanan Turki

Kebijakan keamanan nasional Turki ditentukan oleh Dewan Keamanan Nasional yang terdiri dari Presiden Republik, Pemerintah dan para Komandan Angkatan Bersenjata Turki. Komposisi ini mengungkapkan peran militer dalam politik dan pembuatan kebijakan di Turki. Militer dilibatkan tidak hanya dalam pembuatan kebijakan terkait masalah keamanan dan pertahanan tapi juga politik negara pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa militer selalu memainkan peran kunci dalam politik Turki. Dilihat dari asal-usul Republik, kader pendiri Republik Turki adalah seorang elit militer. Kemudian, dalam sejarah Turki, militer memerintah negara tersebut dalam dua kesempatan, dapat dilihat dari kudeta militer yang terjadi pada tahun 1960 dan 1980.⁸ Peran intervensionis militer ini terkait erat dengan definisi keamanan nasional dan kebijakan keamanan nasional. Bilgin mendefinisikan unsur-unsur keamanan nasional di era Republik sebagai "takut ditinggalkan dan takut kehilangan wilayah" dan "determinisme geografis".⁹

Pada tahun 1960, Komite Persatuan Nasional (NUC)—yang dipimpin oleh Angkatan Darat Republik Turki—menguasai Turki. NUC kemudian merancang sebuah konstitusi baru. Dengan demikian, peran militer di pemerintah semakin kuat selama beberapa dekade. Prinsip di antara perubahan

⁸ CIDOB International Yearbook 2011, *Defence and Security Policy of the Turkish Republic*, Country Profile: Turkey, 2011, diakses dari https://www.cidob.org/en/content/download/30264/359449/file/241-248_ANEXO_POLITICA+DEFENSA+DE+TURQUIA_ANG.pdf pada 12 Februari 2018, hlm. 241

⁹ Pinar Bilgin, *Turkey's Changing Security Discourses: The Challenge of Globalisation*, *European Journal of Political Research*, Vol. 44, No. 1, 2005, hlm. 175-201

konstitusional ini adalah subordinasi Kepala Staf Jenderal hanya kepada Perdana Menteri dan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (dikenal dengan MGK). MGK, meskipun mengalami pergolakan, tetap menjadi badan sipil dan militer yang terdiri dari pejabat kabinet, Kepala Staf Jenderal dan komandan pasukan pemelihara lainnya. Fokus utama MGK adalah pada masalah keamanan nasional. Namun, MGK juga diberi kewenangan luas mengenai kebijakan ekonomi, sosial dan wewenang veto virtual untuk semua kebijakan pemerintah. Ini mengabadikan peran militer dalam menentukan jalannya kebijakan keamanan nasional selama beberapa dekade.¹⁰ Tren ini berlanjut dengan kudeta berikutnya pada tahun 1971, 1980 dan 1997 yang terus-menerus menegaskan kembali peran militer Turki sebagai penjamin visi Kemalis Turki.¹¹ Pandangan militer Turki saat itu adalah: hanya melalui otoritas pusat yang kuat, proses politik dapat dibatasi dalam batas yang dapat diterima seperti yang didefinisikan oleh MGK.¹²

Selama Perang Dingin, keanggotaan NATO berpengaruh pada kebijakan keamanan dan pertahanan Turki. Pada periode ini, Turki menjaga bagian selatan aliansi melawan Pakta Warsawa dan mengambil bagian dalam misi dan operasi NATO. Akhir dari Perang Dingin adalah titik balik dalam hal wacana keamanan di dunia secara keseluruhan, tidak terkecuali untuk Turki. Masalah keamanan Turki berubah menjadi "ancaman internal" dan bukan "ancaman eksternal". Pada tahun 1992, separatisme

¹⁰ Nicole Pope dan Hugh Pope, *Turkey Unveiled*, New York: Overlook, 2011, hlm. 92-96

¹¹ Al Jazeera, *Timeline: A history of Turkish coups*, 16 Juli 2016, diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/europe/2012/04/20124472814687973.html> pada 12 Februari 2018

¹² Dietrich Jung dan Wolfgang Piccoli, *Turkey at the Crossroads*, London dan New York: Zed Books, 2001, hlm. 62

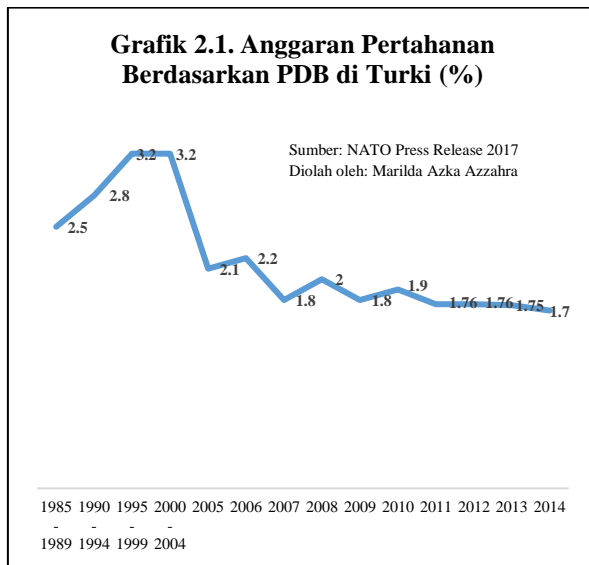
dan terorisme adalah kekhawatiran keamanan utama Turki sementara dalam Dokumen Kebijakan Keamanan Nasional tahun 1997, ancaman internal diidentifikasi dengan jelas sebagai “Islamisme regresif dan separatis Kurdi”.¹³

Unsur penting lain dari kebijakan keamanan dan pertahanan Turki adalah meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi di dunia. Turki merupakan negara transit bagi banyak pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu, mereka menaruh perhatian pada masalah keamanan karena Turki merupakan negara yang berbatasan dengan UE. Untuk menjamin keamanan negara, pencari suaka dan pengungsi, Turki bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional seperti Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

Dalam proses aksesinya Turki ke UE, peran militer dalam masyarakat dan politik Turki dikritik dalam laporan UE. Peran dan intervensi militer yang luas dalam politik Turki merupakan tantangan besar bagi demokratisasi di negara ini. Sebagai tanggapan terhadap laporan UE, beberapa kemajuan telah dicapai dengan mengurangi kekuatan militer sampai batas tertentu. Salah satu bentuk penurunan intervensi militer di Turki adalah penurunan presentase pengeluaran pertahanan Turki berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Pengeluaran pertahanan di Turki sebagai persentase dari PDB turun secara berangsur dari 3,2 persen pada periode 1995-1999 hingga 1,7 persen pada tahun 2014 (Grafik 1).¹⁴

¹³ CIDOB International Yearbook 2011, *loc.cit.*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 241 – 242



Timur tengah adalah salah satu kawasan yang paling ganas dan bergejolak di dunia. Lingkungan terdekat Turki—Irak dan Suriah—pun penuh dengan konflik bersenjata. Ditambah dengan krisis yang belum terselesaikan seputar ambisi nuklir Iran dan kebijakan kawasan yang lebih luas. Hal ini menciptakan lingkungan keamanan yang kaya akan ancaman serta memerlukan pemeliharaan postur militer yang kuat dan efektif. Melihat semua faktor yang disebutkan di atas, nampak jelas bahwa permintaan akan fungsi militer industri pertahanan Turki sangat kuat dan akan tetap ada di masa yang akan datang.

Kebijakan kewananan Turki di Timur Tengah sejak menjadi Republik mengikuti kebijakan *peace at home peace in the world*. Hal ini terlihat dari kebijakan Turki pada tahun 2003, dimana parlemen Turki tidak mengizinkan PBB untuk melakukan invasi ke Irak

melalui pangkalan militer di Turki. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Turki dalam stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Namun, pergantian kepemimpinan dan partai yang berkuasa hingga fenomena *Arab Spring* memaksa Turki untuk keluar dari kebijakan non-gangguan ini.¹⁵

Dengan keberhasilan pemilihan AKP sejak tahun 2002 dan melonggarkan kontrol militer pada partai politik Turki yang dianggap lebih condong keislaman, Davutoğlu—saat menjabat sebagai menteri luar negeri—mendefinisikan pendekatan kebijakan yang jauh berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Davutoğlu, sebagai tokoh sentral pemerintahan AKP sejak pendudukannya berkuasa pada tahun 2002 menolak pendekatan Kemalis dengan pendekatan non-intervensi dan netralitas untuk menghindari dari urusan kawasan yang lebih luas. Terinspirasi oleh Davutoğlu, kebijakan luar negeri Turki berusaha menciptakan kondisi untuk 'kedalaman strategis' dengan memperluas pengaruh Turki ke seluruh Timur Tengah. Kebijakan untuk mengartikulasikan keuntungan dari posisi geografis Turki, sejarah Kekaisaran Ottoman, agama dan pengalaman yang dihasilkan dan kekuatan ekonomi yang meningkat.¹⁶

Davutoğlu menyebutkan bahwa berada di daratan Eurasia menjadikan Turki sangat penting bagi keamanan global. Menurut Davutoğlu, penyebaran kekuatan Barat ke Balkan, Asia Tengah atau Timur Tengah pada akhirnya akan berbahaya bagi wilayah ini dan kepentingan nasional Turki. Oleh karena itu,

¹⁵ Piotr Zalewski, *How Turkey Went From 'Zero Problems' to Zero Friends*, Foreign Policy, 22 Agustus 2013, diakses dari <http://foreignpolicy.com/2013/08/22/how-turkey-went-from-zero-problems-to-zero-friends/> pada 5 Desember 2017

¹⁶ William Robert Lynch, *From 2002-2017, to What Extent Has Turkish Security Policy Been Effective?*, Kansas: School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, 2017, hlm. 23

penyebaran kekuatan tersebut harus dibatasi. Pendapat ini adalah kebalikan dari doktrin Kemalis yang mendukung kebijakan westernisasi yang disengaja dan modernisasi yang mengikutinya.¹⁷

Davutoğlu dan Erdoğan telah menolak pendekatan condong Barat sebelumnya terhadap kebijakan luar negeri. Davutoğlu, pada awal tahun 2004 dengan jelas menyatakan bahwa dia menganggap pembuatan kebijakan luar negeri Turki sebelumnya telah cacat dan didasarkan pada interpretasi sempit tentang geografi dan sejarah Turki.¹⁸ Dalam penyimpangan yang tajam dari doktrin Kemalis, Davutoğlu mengusulkan bahwa potensi Islam harus menjadi sumber kekuatan dan legitimasi komunal, bukan sesuatu yang harus ditakuti.¹⁹

Pada era pasca 2007, Turki memiliki peran aktif di kawasan dan global dengan penekanan khusus pada membantu mempromosikan dialog lintas budaya serta melakukan peran mediasi dalam konflik kawasan dan internasional. Kebijakan luar negeri Turki lebih aktif di kawasan seperti Timur Tengah dimana ruang lingkungannya cukup luas untuk memainkan peran kepemimpinan di kawasan. Kebijakan luar negeri Turki kurang aktif di kawasan seperti Balkan dan Asia Tengah karena cakupan kepemimpinan kawasan lebih terbatas dan berpotensi diperebutkan oleh saingan yang kuat. Turki juga telah menjadi aktor yang lebih aktif dalam intervensi pemeliharaan perdamaian dan kemanusiaan, terutama di Afghanistan dan Balkan.²⁰

Pada tahun 2010, Davutoğlu mengemukakan visinya untuk kebijakan luar negeri Turki, dengan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 23 – 24

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Behlül Ozkan, *Turkey, Davutoglu and the Idea of Pan-Islamism*, Survival 56, No. 4, 2014, hlm. 119-140

²⁰ Ziya Öniş, 2011, *op.cit.* hlm 51

menguraikan enam panduan sesuai dengan teori awalnya tentang Kedalaman Strategis:

Prinsip pertama adalah menyeimbangkan antara kebebasan dan keamanan. Jika keamanan itu baik untuk satu bangsa dan untuk individu, itu juga bagus untuk orang lain. Turki seharusnya tidak menjaga keamanan dengan merugikan kebebasan dan sebaliknya. Oleh karena itu, Turki perlu menemukan keseimbangan yang tepat di antara keduanya.

Prinsip kedua adalah memiliki visi keterlibatan kawasan yang disempurnakan. Turki mengejar kebijakan "zero problems" di lingkungannya. Oleh karena itu Turki percaya bahwa ini adalah tujuan yang dapat dicapai dengan kepercayaan yang cukup di antara pihak-pihak terkait.

Prinsip ketiga menggambarkan diplomasi yang efektif terhadap daerah-daerah tetangga. Tujuan Turki adalah memaksimalkan kerjasama dan saling menguntungkan dengan semua tetangganya. Untuk mencapai tujuan itu, dibangun hubungan dengan tetangga dengan prinsip-prinsip "keamanan untuk semua", "dialog politik tingkat tinggi", "saling ketergantungan ekonomi" dan "harmoni budaya dan saling menghormati."

Prinsip keempat adalah bahwa Turki berusaha saling melengkapi dengan aktor global.

Prinsip kelima adalah penggunaan forum internasional dan inisiatif baru secara efektif untuk menggembelng tindakan terkait masalah yang menjadi perhatian bersama.

Prinsip keenam dan terakhir dari kebijakan luar negeri Turki adalah menciptakan "persepsi baru tentang Turki" melalui peningkatan fokus pada diplomasi publik.²¹

²¹ Ahmet Davutoğlu, *Fostering a Culture of Harmony*, Russia in Global Affairs, 9 April 2010, diakses dari http://eng.globalaffairs.ru/number/n_14784 pada 12 Februari 2018

Menurut Davutoğlu, Turki memiliki geografi yang unik, menempati pusat daya tarik di kawasannya. Dalam hal wilayah pengaruhnya, Turki adalah negara Timur Tengah, Balkan, Kaukasia, Asia Tengah, Caspian, Mediterania, Teluk dan Laut Hitam. Turki harus memberikan keamanan dan stabilitas tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk wilayah tetangganya dan secara umum mencari keuntungan dari posisi geografis dan aset historisnya. Jika ingin, Turki memiliki kesempatan untuk bermanuver di beberapa wilayah secara bersamaan. Hal tersebut dapat terwujud apabila kapasitas untuk melakukannya terus ditingkatkan, dengan visi yang tepat.

Davutoğlu juga pernah mengatakan bahwa, “sebuah negara sentral dengan lokasi geografis yang begitu optimal tidak dapat mendefinisikan dirinya secara defensif”. Turki seharusnya tidak terima apabila hanya dilihat sebagai 'jembatan' antara Barat dan dunia Islam, seperti yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan luar negeri Turki sebelumnya. Karena, Turki adalah salah satu negara pusat, dengan jangkauan geografis yang jauh lebih baik daripada kebanyakan negara lain. Turki harus melepaskan diri dari 'kebijakan parameter statis dan tunggal' dan menjadi 'pemecah masalah' dengan berkontribusi pada 'perdamaian global dan regional'. Davutoğlu menekankan bahwa Turki perlu memainkan peran yang lebih efektif sebagai 'negara dengan peraturan ketertiban' di daerah pedalaman regionalnya, Timur Tengah, Balkan dan Kaukasus. Dengan demikian, Ankara ingin menjadi 'produsen kebijakan' daripada menjadi 'pelaksana kebijakan' untuk AS atau Eropa.²²

Setelah pemilihan umum tahun 2011, AKP kembali memperoleh kemenangan dan memperbaharui gelombang pro-aktivisme di kebijakan

²² *Loc.cit.* Cengiz Dinc dan Mustafa Yetim

luar negeri Turki. Turki mencoba mendapatkan panggung utama dalam *Arab Spring* dengan kritik kerasnya pada Israel dan publikasi laporan PBB mengenai krisis Flotilla. Untuk Mesir, Turki dengan kuat mendukung kekuatan pro-demokratisasi, terutama ketika Presiden Mubarak digulingkan. Bahkan, sebelum kejatuhan Mubarak, Perdana Menteri Erdogan dengan tegas mendesaknya untuk meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Mesir.²³

Tahun 2014 dan 2015 adalah salah satu tahun yang bersejarah bagi kebijakan Turki khususnya di bidang keamanan di Timur Tengah. Turki menjalin hubungan bilateral yang kian erat dengan salah satu negara dengan profil yang sangat berbeda dengannya, yaitu Qatar. “Komite Strategis Tertinggi” (*Supreme Strategic Committee*) dibentuk oleh Turki dan Qatar sebagai mekanisme bilateral untuk dialog dan kerjasama tingkat tinggi.²⁴ Komite tersebut mengawasi perjalanan kebijakan keamanan Turki yang lebih dalam dan luas di kawasan Timur Tengah umumnya dan Qatar khususnya.

B. Pembuat Keputusan Dan Kelompok Kepentingan Turki

Pembuatan kebijakan luar negeri Turki dipengaruhi oleh beberapa aktor dan kelompok kepentingan. Berikut adalah aktor-aktor utama politik luar negeri Turki:

²³ Ziya Öniş, *Turkey and the Arab Spring: Between Ethics and Self-Interest*, Insight Turkey, Vol. 14 No. 3, 2012, hlm. 51 – 52

²⁴ Hurriyet Daily News, *Qatar, Turkey take bold step for strategic cooperation*, 19 Desember 2014, diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/qatar-turkey-take-bold-step-for-strategic-cooperation-75852> pada 15 November 2017

1. Aktor-aktor Politik Luar Negeri Turki

a. Presiden

Ataturk, bapak sekulerisme Turki berpandangan bahwa untuk menjadi negara yang maju, masyarakat Turki harus berubah dari pandangan tradisional mereka menjadi lebih modern seperti dunia Barat. Ataturk giat menyebarkan pentingnya nasionalisme agama sampai di titik dimana jurang antara agama dan pemerintahan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, hal tersebut menjadikan kaum yang pro-Islam sebagai oposisi pemerintah.

Berbeda dengan Presiden Turki sebelumnya, presiden yang menjabat sejak 2014 hingga saat ini, Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin yang fenomenal. Sebelum menjadi presiden, Erdogan yang menjabat sebagai Perdana Menteri kerap meminimalisir sekularisasi di Turki. Campur tangan militer dalam pemerintahan dibatasi dan hak wanita untuk kembali memakai hijab di tempat kerja terpenuhi kembali. Pada awalnya, presiden di Turki dipilih oleh parlemen. Namun, pada pemilu tahun 10 Agustus 2014, pemilihan presiden dilakukan langsung oleh rakyat Turki. Perubahan konstitusi Turki pada tahun 2007 menyebabkan hal tersebut terjadi. Erdogan berhasil terpilih dengan perolehan suara lebih dari 50 persen, bersaing dengan dua kandidat lain. Erdogan telah berulang kali menggarisbawahi keinginannya untuk menggunakan "kekuatan konstitusionalnya sepenuhnya" untuk menjadi "presiden aktif".²⁵ Dalam artian lain, ingin lebih meningkatkan

²⁵ Constanze Letsch, *loc.cit.*

kekuasaan presiden, tidak hanya sebagai simbol negara semata.

Seiring dengan perbedaan pandangan pemimpin sebelumnya dengan Erdogan, hal tersebut berimbas pada kebijakan luar negeri Turki yang berbelok arah pula. Turki sejak menjadi republik selalu menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan kerangka-kerangka Eropa Barat. Namun, sejak Erdogan terpilih menjadi perdana menteri sampai dengan menjadi presiden, kebijakan luar negeri Turki lebih mengarah ke negara-negara dengan latar budaya yang sama dan cenderung melancarkan politik luar negeri ke Timur Tengah.

b. Dewan Keamanan Nasional/*Milli Güvenlik Kurulu* (MGK)

Dewan Keamanan Nasional atau dikenal dengan MGK mengalami beberapa era sebelum menjadi MGK dengan tugas-tugas yang dimilikinya sekarang. Era pertama adalah Era Majelis Pertahanan Tinggi (1933 – 1949), kedua adalah Era Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional (1949 – 1962), ketiga adalah Era MGK di Bawah Konstitusi Tahun 1961 (1962 – 1983) dan terakhir adalah Era MGK di Bawah Konstitusi Tahun 1982 (1983 – 2003 dan 2003 – sekarang). Pada Era terkini dengan amandemen-amandemen yang telah dilakukan, tugas MGK mengalami pembaharuan. Dalam Undang-undang No. 2945, tugas MGK adalah; “MGK, dalam kerangka definisi mengenai keamanan nasional dan kebijakan keamanan nasional negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, harus membuat keputusan penasehat mengenai isu-isu mengenai identifikasi, perumusan, dan implementasi kebijakan keamanan

nasional negara, dan merumuskan pendapat untuk memastikan koordinasi yang diperlukan; harus menyampaikan keputusan dan pendapat penasihat ini kepada dewan menteri dan melakukan tugas yang diberlakukan oleh undang-undang²⁶. Sekretaris jenderal diangkat atas nominasi oleh perdana menteri dan mendapat persetujuan dari presiden. Jika pengangkatannya dilakukan dari anggota angkatan bersenjata, maka diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari panglima angkatan bersenjata.²⁶

MGK adalah dewan koordinasi tertinggi yang bertemu setiap dua bulan sekali di platform konstitusional. Pertemuan dewan ini memberikan kesempatan bertukar pandangan dan debat mengenai masalah keamanan nasional di tingkat tertinggi. MGK yang berada di bawah kepemimpinan presiden terdiri dari Perdana Menteri Turki, Panglima Angkatan Bersenjata Turki, Wakil Perdana Menteri Turki, Menteri Kehakiman, Pertahanan Nasional, Urusan Dalam Negeri dan Luar Negeri Turki, Komandan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Turki dan Komandan Umum *Gendarmerie* Turki. Apabila presiden berhalangan, MGK dipimpin oleh perdana menteri.²⁷

Peran pengambilan keputusan oleh MGK tampak tergantung pada wewenang presiden ataupun yang mewakilinya. Namun, secara keseluruhan MGK menjadi salah satu aktor penting

²⁶ Republic of Turkey Secretariat-General of the National Security Council, *About Us*, diakses dari <https://www.mgk.gov.tr/en/index.php/secretariat-general/about-us> pada 7 Desember 2017

²⁷ Republic of Turkey Secretariat-General of the National Security Council, *About the National Security Council*, diakses dari <https://www.mgk.gov.tr/en/index.php/national-security-council/about-the-national-security-council> pada 7 Desember 2017

yang menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keamanan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

c. Perdana Menteri

Perdana menteri di Turki diangkat presiden dari anggota Majelis Agung Nasional. Perdana menteri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dewan menteri berfungsi secara harmonis dan juga untuk koordinasi antar kementerian. Konstitusi 1982 tidak hanya memperkuat kekuasaan presiden tapi juga perdana menteri. Menurut konstitusi, setiap menteri bertanggung jawab kepada perdana menteri. Perdana menteri memastikan bahwa para menteri memenuhi fungsinya sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.²⁸ Perdana menteri juga memiliki wewenang untuk mengumpulkan nama calon dan mengajukan usul pemecatan menteri kepada presiden.²⁹

Saat Erdogan terpilih menjadi Presiden, Davutoglu yang tadinya merupakan Menteri Luar Negeri Turki diangkat menjadi perdana menteri.³⁰ Davutoglu yang merupakan salahsatu pendiri AKP—selain Erdogan—menjadi arsitek bagi kebijakan luar negeri Turki ketika menjadi menteri

²⁸ General Consulate Republic of Turkey, *Executive Branch*, diakses dari <http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/exec.shtml> pada 7 Desember 2017

²⁹ Komisi Eropa, *eGovernment in Turkey*, diakses dari https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment%20in%20Turkey%20-%20February%202016%20-%20Edition%2013_00_v3_02.pdf pada 7 Desember 2017

³⁰ The National, *Foreign minister Ahmet Davutoglu to be new Turkey PM*, 22 Agustus 2014, diakses dari <https://www.thenational.ae/world/foreign-minister-ahmet-davutoglu-to-be-new-turkey-pm-1.648320> pada 7 Desember 2017

luar negeri. Davutoglu juga dengan kewenangannya dan izin presiden yang juga sahabatnya cenderung terus menjalankan kebijakan luar negeri yang sarat akan *soft diplomacy*.

Pada Mei 2016 Davutoglu mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Turki, digantikan oleh Binali Yildirim—yang juga merupakan sekutu Erdogan. Pengunduran diri tersebut diduga karena konstitusi Turki yang akan seutuhnya berubah menjadi presidensial, juga karena Davutoglu semakin tidak sejalan dengan cara-cara yang diharapkan Erdogan. Yildirim terpilih dan diharapkan oleh Erdogan dapat melakukan transisi Turki ke sistem presidensial.³¹ Nampaknya peran perdana menteri yang besar dalam pembuatan kebijakan juga tergantung pada Presiden yang sedang memimpin Turki saat ini.

d. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Turki adalah salah satu bagian penting dalam politik luar negeri Turki. Kementerian ini didirikan dengan dasar warisan diplomasi Ottoman dan sejarah yang panjang. Setelah proklamasi Republik Turki pada tahun 1923, Kementerian Luar Negeri Turki mulai mengembangkan struktur kelembagaan internal dan eksternal. Melalui kementerian ini, Turki telah menerapkan kebijakan luar negeri yang aktif dan damai sejak tahun 1930-an, sesuai dengan pendiri Republik Turki, Ataturk.

Setelah Perang Dingin, perkembangan dan perubahan struktural terjadi di Turki. Misi Turki di

³¹ Marina Koren, *Turkey's New Prime Minister*, The Atlantic, 22 Mei 2016, diakses dari

<https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/05/turkey-prime-minister/483842/> pada 7 Desember 2017

luar negeri meningkat secara signifikan seiring dengan munculnya negara-negara baru. Pada tahun 1924, Republik Turki hanya memiliki total 39 misi diplomatik dan konsuler di luar negeri. Kini, Turki diwakili oleh 236 misi di seluruh dunia yang terdiri dari 135 kedutaan besar, 13 representasi permanen untuk organisasi internasional, 86 konsulat jenderal, 1 instalasi konsuler dan 1 kantor perdagangan. Layanan Luar Negeri Turki memiliki total 1796 orang diplomat (tahun 2017) dan misinya di luar negeri terus beroperasi untuk mempromosikan hubungan politik, ekonomi dan budaya internasional Turki dalam konteks bilateral dan multilateral. Perwakilan tersebut juga berkontribusi untuk perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah penempatan dan sekitarnya.³²

e. Kementerian Pertahanan Nasional

Kementerian Pertahanan Nasional Republik Turki bertanggung jawab sebagai koordinator dan pengawas semua lembaga dan fungsi pemerintah serta Angkatan Bersenjata Turki. Kementerian ini dipimpin oleh seorang menteri pertahanan nasional yang bertanggung jawab secara langsung pada Perdana Menteri Turki (saat masih menganut sistem parlementer) dan Presiden Turki (saat sudah menjadi presidensial).

Sejak kudeta pada tahun 1960 sampai sekarang, terjadi perubahan-perubahan dalam hierarki kementerian pertahanan nasional dalam pemerintah, terutama terkait hubungannya dengan

³² Turkey Ministry of Foreign Affairs, *Brief History of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey*, diakses dari <http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-tarihcesi.en.mfa> pada 12 Februari 2018

Staf Jenderal Republik Turki. Pada tahun 1960 dan sebelumnya, Staf jenderal secara demokratis berada di bawah komando kementerian pertahanan nasional. Hubungan antar-institusi ini dianggap rentan menyebabkan kembali kudeta di masa depan karena hierarki yang kurang memiliki substansi. Hubungan hierarkis presiden, Kementerian Pertahanan Nasional, Staff Jenderal dan angkatan bersenjata ini juga berpotensi mengundang berbagai jenis intervensi militer dan pemberontakan. Pasca kudeta yang gagal pada tahun 2016, Kementerian Pertahanan Nasional Turki diberikan mandat untuk menggantikan wewenang staf jenderal. Kementerian Pertahanan Nasional Turki kini memiliki wewenang atas komando angkatan darat, udara dan laut baik di masa damai maupun perang. Kementerian pertahanan nasional kini juga memiliki wakil sipil, yang diberikan pangkat militer untuk pertama kalinya.³³

f. Staf Jenderal (*General Staff*)

Staf Jenderal Republik Turki memiliki tanggung jawab memimpin Angkatan Bersenjata Republik Turki. Angkatan Bersenjata Republik Turki terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan pasukan khusus. Kepala staf jenderal adalah panglima angkatan bersenjata. Kepala staf jenderal saat ini adalah Hulusi Akar. Menurut Konstitusi Turki, kepala staf jenderal melapor kepada perdana menteri selama masa

³³ Omer Aslan, *Turkey's 'Fractured Military' in Historical Perspective and Recommendations for a Military Reform Agenda*, 2016, diakses dari <http://www.sharqforum.org/2016/09/07/turkeys-fractured-military-in-historical-perspective-and-recommendations-for-a-military-reform-agenda/> pada 13 Februari 2018

damai dan bertindak sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Turki. Selama masa damai, *gendarmerie* dan *coast guard*, sebagai bagian dari pasukan keamanan internal, berafiliasi dengan Kementerian Urusan Dalam Negeri Turki, sedangkan pada masa perang, mereka masing-masing berada di bawah komando angkatan darat dan komando angkatan laut. Pada masa perang, kepala staf jenderal berwenang sebagai panglima tertinggi atas nama parlemen, yang diwakili oleh presiden. Memberi komando pada angkatan bersenjata serta menetapkan kebijakan dan program yang terkait dengan persiapan personil untuk layanan tempur, intelijen, operasi, organisasi, pelatihan dan logistik merupakan tanggung jawab staf jenderal. Selanjutnya, staf jenderal mengkoordinasikan hubungan militer Angkatan Bersenjata Turki dengan rekan-rekannya di negara-negara anggota NATO dan negara-negara sahabat lainnya.

Kepala staf jenderal menempati peringkat kelima tertinggi, di bawah Presiden Republik, Presiden Mahkamah Konstitusi, Ketua Majelis Nasional Agung dan Perdana Menteri, dalam protokol Republik Turki. Kepala staf jenderal bertanggung jawab kepada Perdana Menteri Turki atas keseluruhan perintah dan kontrol angkatan bersenjata. Kepala staf jenderal juga bertanggung jawab untuk melakukan operasi militer secara efektif serta kesiapan operasional angkatan bersenjata. Komandan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara melapor langsung ke kepala staf jenderal. Staf jenderal dan kementerian pertahanan nasional bekerja dalam koordinasi untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing.

Meskipun peraturan konstitusional mengatur dewan menteri untuk membentuk kebijakan pertahanan, selama Perang Dingin pada tahun

1990an staf jenderal memiliki wewenang untuk keputusan final dalam praktik masalah pertahanan. Staf jenderal menyiapkan rencana pertahanan dan merumuskan anggaran pertahanan. Staf jenderal juga mempersiapkan kerangka kerja militer politik, dan bersama dengan kementerian luar negeri, (yang hanya memiliki pengaruh sekunder) mengevaluasi ancaman tersebut, menentukan persyaratan persenjataan yang relevan, struktur kekuatan dan menandatangani perjanjian militer. Staf jenderal berbagi kebijakan pertahanan dengan pemerintah di dewan keamanan nasional, di mana warga sipil kebanyakan mendengarkan dan menerima yang disajikan.³⁴

g. Majelis Agung Nasional Turki (*Grand National Assembly of Turkey*)

Sebelum resmi mengadopsi sistem pemerintahan presidensial seperti sekarang, Turki menganut sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah harus mendapat dukungan dari majelis dan bertanggung jawab kepada majelis. Pemerintah memulai tugasnya dengan mendapatkan mosi percaya dari majelis. Majelis Agung Nasional Turki terdiri dari 550 deputi yang secara langsung dipilih dari 81 provinsi dan 85 kabupaten pemilihan secara keseluruhan di Turki. Dalam Pasal 87 Konstitusi dijelaskan tugas dan wewenang Majelis Agung Nasional Turki sebagai berikut:³⁵

³⁴ Mustafa Oğuz, “*Turkey’s Defense Policy Making Process And Its Effects On Weapons Procurement*”, Tesis S2, The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2009, hlm. 60

³⁵ The Grand National Assembly of Turkey, *Duties and Powers*, diakses dari <https://global.tbmm.gov.tr/index.php/EN/yd/icerik/13> pada 9 Desember 2017

- Menerapkan, mengubah dan membatalkan hukum,
- Meneliti dewan menteri dan menteri,
- Memberi wewenang kepada dewan menteri untuk mengeluarkan keputusan dengan undang-undang tentang hal-hal tertentu,
- Mendebat dan mengadopsi tagihan anggaran dan *bills final account* dan akun akhir tagihan,
- Memutuskan menerbitkan mata uang,
- Memutuskan deklarasi perang,
- Menyetujui ratifikasi perjanjian internasional,
- Memutuskan pemberian amnesti umum dan pengampunan,
- Melatih kekuatan dan melaksanakan tugas yang diprediksi di artikel Konstitusi lainnya.

Dalam pasal lain di Konstitusi, dijelaskan pula tugas dan wewenang yang diberikan kepada Majelis Agung Nasional Turki.³⁶

- Mengubah Konstitusi,
- Menyetujui rencana pembangunan,
- Mengadopsi Aturan Prosedur Majelis Nasional Agung Turki,
- Menyetujui, mengubah dan menolak keputusan yang memiliki kekuatan hukum,
- Menyetujui keputusan tentang keadaan darurat dan darurat militer, memperpanjang durasi mereka hingga tidak lebih dari empat bulan di setiap giliran, dan menghapuskan keadaan darurat dan darurat militer.
- Menyetujui keputusan yang memiliki kekuatan hukum untuk dikeluarkan oleh dewan menteri yang berada di bawah kepemimpinan presiden

³⁶ *Ibid.*

republik dalam keadaan darurat dan darurat militer,

- Memilih Ketua dan anggota Biro Majelis Nasional Agung Turki,
- Pemilihan anggota mahkamah konstitusi,
- Memilih anggota dewan tertinggi radio dan televisi,
- Memilih presiden dan anggota pengadilan tinggi,
- Memilih ketua auditor publik,
- Memutuskan untuk memperbarui pemilihan Majelis Nasional Agung Turki sebelum waktunya,
- Mendakwa presiden untuk pengkhianatan tingkat tinggi,
- Meningkatkan kekebalan parlemen,
- Memutuskan hilangnya keanggotaan,
- Mengizinkan penempatan Angkatan Bersenjata Turki di luar negeri dan mengakui kehadiran angkatan bersenjata asing di Turki, dan
- Meneliti perusahaan ekonomi publik.

Pada dasarnya, Majelis Agung Nasional Turki memiliki peran strategis melalui komite pertahanan nasional dan komite urusan luar negeri yang dimilikinya. Majelis Agung Nasional Turki juga memiliki salah satu tugas dan wewenang “Mengizinkan penempatan Angkatan Bersenjata Turki di luar negeri dan mengakui kehadiran angkatan bersenjata asing di Turki”. Komisi-komisi tersebut dengan tujuan dan wewenang yang diberikan dapat menambah, mengurangi bahkan menghentikan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan Turki. Ratifikasi perjanjian internasional juga tidak dapat dilakukan tanpa

wewenang Majelis Agung Nasional Turki. Oleh karena itu, Majelis Agung Nasional Turki memiliki peran dalam menentukan proses pembuatan keputusan politik luar negeri Turki. Penempatan militer ataupun tentara di luar negeri pun tidak akan dilaksanakan tanpa izin dari Majelis Agung Nasional Turki.

AKP adalah partai yang memenangkan pemilu di Turki sejak tahun 2002. Hal tersebut dapat disebut sebagai fenomena bersejarah. Sejak Musthafa Kemal Atatürk menggagaskan Turki Modern pada tahun 1923, birokrasi di Turki penuh dengan tokoh liberal dan sekuler. Kemenangan AKP pada pemilu tahun 2002 memberikan kekuasaan pada pemimpin-pemimpin Islami yang tidak pro-Barat. Hal tersebut berimbas pada kebijakan luar negeri Turki yang berubah menghadap ke negara-negara dengan ideologi dan budaya yang masih sama, yaitu negara-negara Timur Tengah.

Ahmet Davutoğlu mengakui bahwa sejak partai AKP menjadi partai pemerintah dengan posisi dominan di parlemen Turki pada bulan November 2003, 'sebuah paradigma baru' muncul dalam kebijakan luar negeri Turki. Dengan menggunakan wacana Islamis, penasihat kebijakan yang berpengaruh ini memajukan visi Turki yang baru untuk memainkan peran yang menentukan sebagai peserta tatanan dunia multi dimensi, yang masih dalam hubungan positif dengan Amerika Serikat dan Israel, namun juga pemain aktif di Eropa, Timur Tengah dan Asia Tengah.³⁷

³⁷ Alexander Murinson, *The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy*, Middle Eastern Studies, Vol. 42, No. 6, November 2006, hlm. 960

2. Kelompok Kepentingan di Turki

Setelah Perang Dunia ke-II, kelompok-kelompok kepentingan berkembang menjadi asosiasi yang semakin aktif secara politik. Pertumbuhan ini menunjukkan kecenderungan umum masyarakat yang lebih terpolitisasi dan plural. Tren ini dihasilkan dari faktor-faktor seperti munculnya politik multipartai, pembangunan ekonomi dan perluasan peluang yang menyertainya dan perbaikan dalam komunikasi. Peningkatan urbanisasi dan angka melek huruf, ekspansi industri yang cepat, dan pemaparan ratusan ribu pekerja Turki ke ide-ide dan kebiasaan baru di Eropa Barat juga berkontribusi pada politisasi dari rakyat. Akibatnya, semakin banyak asosiasi sukarela muncul untuk mempromosikan kepentingan tertentu, baik sendiri, melalui perwakilan di parlemen, atau melalui kabinet dan birokrat senior. Asosiasi ini memungkinkan berbagai kelompok sosial untuk memberikan pengaruh politik. Kegiatan kelompok seperti serikat pekerja, asosiasi bisnis, organisasi kemahasiswaan, asosiasi jurnalis, asosiasi agama dan budaya mempromosikan kesadaran masyarakat akan isu-isu penting dan berkontribusi pada masyarakat sipil.³⁸

Otonomi kelompok-kelompok sipil yang berhadapan langsung dengan negara (*vis-a-vis*) telah menjadi masalah politik yang berkepanjangan sejak tahun 1960. Selama periode kekuasaan militer dan darurat militer, kemandirian kelompok-kelompok seperti itu sering dibatasi. Setelah kudeta militer pada bulan September 1980, misalnya, kegiatan politik asosiasi sipil diberikan pembatasan yang ketat. Sebagai contoh, konstitusi 1982—seperti tahun

³⁸ Helen Chapin Metz, ed., *Turkey: A Country Study*, Washington: GPO for the Library of Congress, 1995, diakses dari <http://countrystudies.us/turkey/> pada 13 Februari 2018

1961—menegaskan hak individu untuk membentuk asosiasi tetapi juga menetapkan bahwa pelaksanaan hak ini tidak boleh melanggar "integritas tak terpisahkan dari negara". Selanjutnya, asosiasi dilarang untuk mendiskriminasi berdasarkan bahasa, ras, atau agama, atau mencoba untuk mempromosikan satu kelas sosial atau kelompok atas yang lain. Asosiasi sipil juga dilarang untuk mengejar tujuan politik, terlibat dalam kegiatan politik, menerima dukungan dari atau memberikan dukungan kepada partai politik serta mengambil tindakan bersama dengan serikat pekerja atau organisasi profesional. Selain itu, undang-undang yang diberlakukan pada tahun 1983 melarang guru, siswa sekolah menengah, pegawai negeri, dan tentara dari membentuk asosiasi, dan melarang pejabat organisasi profesional untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik.³⁹

Dalam pemerintahan yang dikuasai AKP, kelompok kepentingan—yang sesuai dengan konteks penelitian ini—yang dapat dikatakan terlibat atau dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan politik luar negeri di Turki adalah:

a. Kelompok Kepentingan Kemahasiswaan

Pengajar dan mahasiswa perguruan tinggi telah bertindak sebagai kelompok penekan di Turki sejak akhir 1950-an, ketika mereka memprakarsai demonstrasi melawan metode pengajaran universitas, kurikulum, dan praktik administrasi yang mereka duga menyebabkan pendidikan yang tidak memadai. Penindasan penuh kekerasan terhadap demonstrasi mahasiswa pada musim semi tahun 1960 adalah salah satu faktor yang mendorong kudeta militer tahun itu. Pada tahun

³⁹ *Ibid.*

1960, baik pengajar universitas maupun mahasiswa umumnya mendapat penghargaan publik yang tinggi karena universitas dipandang sebagai pusat di mana para elit Kemalis di masa depan sedang dididik. Namun, selama tahun 1960-an dan 1970-an, universitas menjadi lokus konflik ideologis di antara banyak kelompok politik yang menganut beragam ide politik, ekonomi dan agama. Ketika mahasiswa menjadi semakin radikal dan keras, frekuensi dan besar bentrokan bersenjata di antara kelompok mahasiswa yang bersaing serta antara siswa dan polisi meningkat. Pada tahun 1980 militer menganggap universitas sebagai sumber ancaman terhadap prinsip Kemalis.

Salah satu tujuan dari pemerintah militer yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1980 adalah untuk mendapatkan kembali kontrol negara atas universitas. Rezim menciptakan dewan pendidikan tinggi, yang dimaksudkan untuk memberikan sistem administrasi pusat yang kurang otonom dan lebih seragam. Rezim tersebut membersihkan para profesor yang diduga ideologis dari semua universitas dan mengeluarkan undang-undang yang melarang para pengajar bergabung dengan partai-partai politik. Asosiasi mahasiswa kehilangan otonomi mereka, dan siswa yang dituduh berpartisipasi dalam organisasi ilegal menjadi sasaran pengusiran. Kebangkitan yang hati-hati dari aktivitas politik kampus dimulai pada tahun 1990-an, terutama di seputar isu-isu kebijakan luar negeri. Namun, pada awal 1995, kepemilikan sarana dan keinginan pemerintah untuk menghukum aktivis kampus tampaknya mengintimidasi sebagian besar pengajar dan mahasiswa.

b. Kelompok Kepentingan Agama

Turki secara resmi telah menjadi negara sekuler sejak 1924. Ataturk memandang keterikatan pada agama sebagai penghambat modernisasi dan memaksakan pembatasan ketat terhadap praktik Islam. Sampai akhir 1940-an, pemisahan masjid dan negara secara kaku ditegakkan oleh pemerintah satu partai otoriter. Namun, sekularisme tetap merupakan ideologi elit. Sedangkan Islam—agama dari 98 persen populasi Turki—terus menjadi pengaruh kuat pada sebagian besar orang, terutama di daerah pedesaan dan lingkungan perkotaan kelas bawah. Munculnya politik kompetitif pada 1950 memberikan agama kesempatan untuk memperoleh kembali status publik yang dihormati. Partai-partai secara politis menarik perhatian simpatisan agama dalam kampanye mereka. Sejak saat itu, terjadi kebangkitan asosiasi keagamaan sukarela, termasuk *tarikatarlar* (bernyanyi, *tarikatar*⁴⁰). Namun, sebelum tahun 1970, agama bukanlah masalah politik.

Kebangkitan agama di Turki memiliki implikasi kebijakan luar negeri karena *tarikatarlar* cenderung dihubungkan dengan kelompok agama di negara-negara Muslim lainnya. Arab Saudi, misalnya, telah menjadi sumber penting dukungan keuangan ekstensif yang memungkinkan *tarikatarlar* untuk menjalankan program amal yang meningkatkan pengaruh politik mereka. Para pemimpin politik Turki juga takut akan pengaruh negara tetangga Iran, di mana pemerintah Islam menggantikan rezim sekuler pada tahun 1979, dan

⁴⁰ Sebuah tarekat sufi atau pondok, biasanya dipimpin oleh seorang guru atau guru yang dikenal sebagai Seyh, di mana umat melakukan jalan instruksi menuju kesempurnaan spiritual.

sejak 1987 cenderung menyalahkan insiden kekerasan agama terhadap agen-agen Iran.

c. Kelompok Kepentingan Militer

Karena pengaruh yang telah diberikannya pada politik sejak awal-awal republik, militer merupakan kelompok kepentingan paling penting di Turki. Atatürk dan sekutu utamanya adalah perwira karir selama tahun-tahun terakhir Kekaisaran Ottoman. Meskipun Atatürk kemudian berusaha memisahkan militer dari urusan politik, dia menganggap tentara sebagai "intelijensia bangsa Turki" dan "penjaga cita-citanya." Pada saat kematian Atatürk pada tahun 1938, militer telah menginternalisasi pandangan dirinya sebagai elit nasional yang bertanggung jawab untuk melindungi Keenam Panah Kemalisme. Sebelum 1960, militer bekerja di belakang layar untuk memastikan bahwa negara itu berpegang pada pedoman prinsip Kemalisme. Namun, pada tahun 1960, perwira senior sangat khawatir dengan kebijakan pemerintah yang mereka anggap menyimpang dari Kemalisme sehingga mereka turun tangan secara langsung dalam proses politik dengan menggulingkan pemerintah terpilih dan membentuk sebuah rezim militer. Misi kelompok kepentingan Militer adalah menempatkan negara kembali ke jalur Kemalisme yang benar. Kelompok ini percaya bahwa pada Oktober 1961 tujuan ini telah tercapai dan para perwira kembali ke barak—tempat mereka melakukan pengawasan terhadap politisi sipil.

Kudeta tahun 1960 menunjukkan status khusus militer sebagai kelompok kepentingan otonom dari pemerintah. Pada dua kesempatan berikutnya, pada tahun 1971 dan 1980, militer kembali campur tangan untuk menghapus

pemerintah yang dianggap melanggar prinsip Kemalis. Kudeta tahun 1980 menghasilkan masa transisi yang lebih lama ke pemerintahan sipil dan pemberian pembatasan hak-hak politik yang lebih luas daripada intervensi sebelumnya. Pada awal tahun 1995, sekitar empat belas tahun setelah kudeta tersebut, perwira senior dalam angkatan bersenjata masih mengharapkan presiden sipil dan dewan menteri untuk memperhatikan saran mereka mengenai hal-hal yang mereka anggap berkaitan dengan keamanan nasional. Misalnya, militer mendefinisikan banyak masalah hukum dan hukum dalam negeri yang berada dalam wilayah keamanan nasional dan oleh karena itu keduanya merumuskan dan menerapkan kebijakan tertentu yang diharapkan pemerintah setuju.⁴¹

C. Hubungan Turki dan Qatar

Turki memiliki hubungan persahabatan yang dalam dengan Qatar hampir di semua bidang. Kunjungan bilateral yang intensif di semua tingkat menambah erat hubungan bilateral kedua negara. Keduanya juga berkoordinasi erat dalam isu-isu di kawasan terutama Timur Tengah.⁴²

Baik Turki dan Qatar berbagi banyak hal yang sama, dengan kerjasama antara kedua negara yang telah dipertahankan sejak tahun 1970-an. Selama tahun 1980-an, kedua negara memulai perjanjian bilateral dengan satu sama lain dan menjadikan hubungan baik mereka semakin erat layaknya aliansi. Kerjasama politik telah dipertahankan di antara kedua negara di situasi seperti *Arab Spring*, Perang Saudara Suriah dan Krisis Mesir. Turki dan Qatar

⁴¹ Helen Chapin Metz, *loc.cit.*

⁴² Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, *Bilateral Political Relations between Turkey and Qatar*, diakses dari <http://www.mfa.gov.tr/turkey-qatar-relations.en.mfa> pada 13 Februari 2018

sama-sama mendukung Ikhwanul Muslimin dan demonstrasi anti-pemerintah di banyak negara di Timur Tengah.⁴³

Namun, meskipun kedua negara memiliki hubungan politik yang baik, nampaknya hubungan ekonomi mereka tidak terlalu utama. Padahal, perbedaan keunggulan ekonomi kedua negara adalah peluang untuk melakukan kerjasama dalam bidang ini. Hubungan ekonomi antara Turki dan Qatar tidak pada tingkat yang diinginkan kedua pihak. Ekspor dari Turki ke Qatar tetap sangat rendah, hanya mencapai sekitar 344 juta dolar AS pada tahun 2014. Statistik menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Qatar dengan Turki berada pada tingkat yang sama dengan hubungan ekonomi Turki dengan negara-negara yang hanya memiliki hubungan politik yang moderat. Sementara itu, sebagian besar tetangga Qatar memiliki hubungan ekonomi yang lebih baik dengan Turki. Sebelumnya, tidak banyak hal yang dilakukan dalam hal peningkatan hubungan ekonomi antara kedua negara. Namun, sekarang kedua negara telah menyatakan minatnya dalam meningkatkan hubungan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 ketika Forum Bisnis Turki-Qatar pertama kali diadakan.⁴⁴

Bukti lebih lanjut dari langkah yang diambil untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara adalah pada Forum Bisnis Turki-Qatar tahun 2011, di mana Turki menyatakan rencana mereka untuk berinvestasi 130 miliar dolar AS di sektor energi, 110 miliar dolar AS di sektor transportasi dan lebih dari 10 miliar dolar AS dalam teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Qatar

⁴³ Turkish Think Tank, *Relations between Turkey and Qatar solidify*, diakses dari <http://www.turkishthinktank.net/articles/relations-between-turkey-and-qatar-solidify/> pada 13 Februari 2014

⁴⁴ *Ibid.*

berada di tempat pertama untuk visi ekonomi asing mereka.⁴⁵

Dalam bidang militer, Turki dan Qatar juga menandatangani perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut menyiratkan bahwa kedua belah pihak dapat bertukar penempatan pasukan gabungan mereka. Selain itu, pada 2 Juli 2002 kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelatihan militer dan nota kesepahaman dalam industri pertahanan.⁴⁶ Perjanjian kerjasama yang melibatkan industri pertahanan kedua negara diresmikan pada 2007.⁴⁷ Pada Maret 2012, Qatar mengakuisisi *drone* pertamanya dari Turki dalam bentuk sepuluh mini-drone senilai 2,5 juta dolar AS. Penjualan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang dibentuk pada Mei 2011 di mana Turki akan menjual peralatan militer senilai 120 juta dolar AS ke Qatar dalam rentang satu tahun.⁴⁸ Kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama militer pada Juli 2012, tetapi rincian perjanjian itu tidak dipublikasikan.⁴⁹

Pada 1 Desember 2015, Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani menandatangani serangkaian perjanjian di berbagai bidang mulai dari energi hingga pertahanan. Kesepakatan ini akan memainkan peran penting dalam respon Turki terhadap pernyataan-pernyataan keras yang dibuat oleh

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Jaber Al Harmi, *Qatar and Turkey: Relations that transcend traditional diplomatic frames*, Yeni Şafak News, 10 September 2015, diakses dari <https://www.yenisafak.com/en/news/qatar-and-turkey-relations-that-transcend-traditional-diplomatic-frames-2297729> pada 13 Februari 2018

⁴⁷ Giorgio Cafiero dan Daniel Wagner, *Turkey and Qatar's Burgeoning Strategic Alliance*, Middle East Institute, 8 Juni 2016, diakses dari <http://www.mei.edu/content/article/turkey-and-qatar-s-burgeoning-strategic-alliance> pada 14 Februari 2018

⁴⁸ Hürriyet Daily News, *Turkey sells mini drones to Qatar*, 13 Maret 2012, diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-sells-mini-drones-to-qatar-15862> pada 14 Februari 2018

⁴⁹ Hürriyet Daily News, *Turkey and Qatar sign army cooperation deal*, 3 Juli 2012, diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-and-qatar-sign-army-cooperation-deal-24593> pada 13 Februari 2018

otoritas Rusia setelah Turki menenggelamkan jet militer Rusia yang telah melanggar wilayah udara Turki—meskipun sudah diperingatkan beberapa kali untuk keluar dari Turki.⁵⁰ Taner Yıldız, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam di Turki menyatakan bahwa Qatar menjadi pemasok utama gas alam untuk Turki (sebelumnya Rusia). Impor minyak dan gas alam Turki telah meningkat dari 9 miliar dolar AS pada tahun 2002 menjadi 60 miliar dolar AS.⁵¹

Turki dan Qatar telah menghabiskan 2015 hingga 2017 mengejar kebijakan luar negeri bertentangan dengan kepentingan tetangga mereka dan Barat, termasuk dukungan untuk kelompok Islamis dan jihadis di seluruh wilayah. Mereka dianggap tidak terikat oleh sekutu tradisional mereka, yang waspada terhadap pertarungan Turki-Qatar untuk hegemoni regional.⁵² Perdana menteri kedua negara telah melakukan beberapa kunjungan resmi ke masing-masing negara, meningkatkan hubungan dan memungkinkan Turki dan Menteri Luar Negeri Qatar untuk menyetujui pembentukan Dewan Kerjasama Strategis Tingkat Tinggi pada Januari 2015 untuk meningkatkan hubungan bilateral.⁵³

"Komite Strategis Tertinggi" antara Turki dan Qatar didirikan pada tahun 2014 sebagai mekanisme bilateral untuk dialog dan kerja sama tingkat tinggi. Pertemuan pertama komite ini diadakan di Doha pada tanggal 2 Desember 2015, sementara pertemuan keduanya berlangsung di Trabzon pada 18 Desember 2016 di bawah kepemimpinan bersama Presiden Recep Tayyip Erdogan

⁵⁰ Erhan Akkaş, Turkey and Qatar strengthen economic relations after Russia tension, Daily Sabah, 23 Desember 2015, diakses dari <https://www.dailysabah.com/op-ed/2015/12/23/turkey-and-qatar-strengthen-economic-relations-after-russia-tension> pada 13 Februari 2018

⁵¹ Süleyman Elik, *Turkey- GCC Relations 2002-2014: Prospects and Challenges for the Middle East Regional System*, BILGESAM Analysis/Middle East, No. 1117, 21 Februari 2014, hlm. 4 – 5

⁵² Wikistrat Crowdsourced Simulation, op.cit hlm. 9

⁵³ *Loc.cit.* Turkish Think Tank

dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani. Pertemuan Ketiga Komite Strategis Tertinggi diadakan di Doha pada 14-15 November 2017 di bawah kepemimpinan yang sama dari kedua negara. Selama pertemuan tersebut, berbagai perjanjian, protokol dan nota kesepahaman ditandatangani, semakin memperkuat hubungan Turki dengan Qatar.⁵⁴

⁵⁴ *Loc.cit.* Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, *Bilateral Political Relations between Turkey and Qatar*